

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan setiap perusahaan berusaha membangun citra yang baik di masyarakat dengan memberikan perhatiannya kepada lingkungan, yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Menurut Yusuf (2007:52) *Corporate Social Responsibility* merupakan konsep ketika perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan lebih baik dan lingkungan yang lebih lestari.

Kegiatan tanggung jawab sosial awalnya merupakan kegiatan yang sifatnya sukarela. Namun pada September 2007 pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mulai diwajibkan melalui UU Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 2007 dinyatakan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berhubungan dengan sumber daya alam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada pasal 66 ayat 2c UU No. 40 Tahun 2007, menyatakan bahwa semua perseroan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Pengungkapan informasi pelaksanaan kegiatan CSR telah dianjurkan dalam PSAK No. 1 tahun 2009 tentang Penyajian Laporan Keuangan, bagian tanggung jawab atas Laporan Keuangan paragraf 09.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada prinsipnya CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada masyarakat, lingkungan, serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tanggung jawab tersebut meliputi mencegah dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan terhadap pihak lain dan lingkungan serta meningkatkan kualitas masyarakat.

Menurut (Safrilia dan Seftiana, 2012) faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial adalah kepemilikan saham pemerintah, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan karena sebagai pihak pemangku kepentingan kepemilikan saham pemerintah yang mempunyai peran yang sangat besar terhadap kebijakan perusahaan dan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah serta mendapat sorotan yang lebih dari rakyat dalam hal ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan dan perusahaan korporasi juga memiliki tanggung jawab ekonomi kepada para kreditor yang telah menyediakan pinjaman bagi perusahaan serta seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar setiap tahunnya, perusahaan besar juga rentan terhadap pengawasan oleh berbagai kelompok sehingga menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mengungkapkan kegiatan sosial jadi, sangat menentukan sejauh mana perusahaan tersebut mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan.

Rasio leverage digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertagihnya suatu utang. Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Oleh karena itu perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi mempunyai kewajiban lebih untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya (karina, 2013)

profitabilitas merupakan faktor yang dapat membuaat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan tersebut. Sebaliknya ketika tingkat profitabilitas rendah perusahaan akan berharap pengguna laporan akan membaca *good news* kinerja perusahaan ( Karina, 2013)

Menurut Hanifa dan Cooke (2005) menemukan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi tingkat pengungkapan korporasi dalam laporan tahunan. Organisasi besar melakukan kegiatan lebih banyak dan memiliki lebih besar dampak rentan terhadap pengawasan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mengungkapkan kegiatan sosial mereka agar bertanggung jawab secara sosial dan hukum (Cowen et al.1987)

CSR di Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. *Pertama*, pelaksanaan CSR memang merupakan praktik bisnis secara sukarela (*discretion busines practice*) artinya pelaksanaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan

perusahaan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. *Kedua*, pelaksanaan CSR bukan lagi merupakan *discretion business practice*, melainkan pelaksanaannya sudah diatur oleh undang-undang (bersifat *mandatory*). Sebagai contoh, Pelaksanaan CSR lainnya yang bersifat *mandatory* adalah pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan BUMN memiliki peran dan fungsi yang strategis, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi serta memenuhi segala aspek dalam tema pengungkapannya yang berkaitan dengan CSR. Perusahaan BUMN dipercaya membutuhkan *image* yang lebih baik dari masyarakat karena rentan terhadap pengaruh politik dan kritikan dari aktivis- aktivis sosial.

Selain itu, status perusahaan sebagai BUMN lebih luas dalam mengungkapkan tanggung jawab social perusahaan (*CSR Disclosure*) karena perusahaan BUMN sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau negara atau rakyat. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, BUMN diawasi langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi dari rakyat.

Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan, memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan korporasi yang dimiliki sepenuhnya oleh swasta (*private company*). Pada perusahaan BUMN berbentuk perseroan, selain melekat tujuan perusahaan untuk memperoleh optimalisasi laba, perusahaan juga dituntut untuk memberikan layanan kepada publik. Misalnya, melalui Paket Januari 1990, Menteri Keuangan membuat Surat Keputusan Menteri Keuangan yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

mewajibkan BUMN menyisihkan 1- 5% dari laba yang mereka peroleh untuk membina Usaha Kecil dan Koperasi atau yang saat ini diubah menjadi Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Peran BUMN dalam melakukan PKBL memiliki arti tersendiri untuk kondisi Indonesia saat ini, terutama masalah kemiskinan dan pengangguran. PKBL yang dilaksanakan oleh BUMN akan turut menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang selama ini belum dapat diserap oleh sektor formal. Selain itu PKBL juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitarnya untuk bidang sosial, keagamaan, dan ekonomi masyarakat, baik kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*) maupun program kemitraan di bidang ekonomi seperti : bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan, pelatihan, pengembangan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelestarian alam.

Namun, Program Kemitraan Bina Lingkungan yang dilaksanakan BUMN sejauh ini belum mencerminkan pelaksanaan CSR yang menunjang rencana strategis perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini terlihat dari berbagai program bina lingkungan yang dilaksanakan BUMN sejauh ini yang masih bersifat sporadis. Misalnya, pelaksanaan bantuan untuk usaha kecil dan koperasi (biasanya dalam bentuk pemberian kredit bunga rendah sebesar enam persen, pelatihan teknis, dan koperasi yang tidak memiliki kaitan dengan bisnis inti perusahaan. Padahal bina lingkungan sebagai salah satu program CSR akan lebih berdaya guna bila pelaksanaan bina lingkungan disesuaikan dengan kompensasi perusahaan,

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingat dana yang disisihkan dari laba BUMN serta digunakan untuk PKBL setiap tahunnya mencapai Rp 600-900 miliar.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia “Danang Girindrawardana” menilai pelaksanaan program kemitraan bina lingkungan dan *community social responsibility* oleh perusahaan negara dan daerah belum dilaporkan dengan baik. Selain itu ada juga perusahaan negara dan daerah yang melaksanakan kegiatan CSR seadanya tanpa perencanaan dan tindak lanjut yang baik. Namun tidak sedikit pula yang membuat kegiatan CSR dengan baik, serta punya lembaga mandiri yang meneruskan kegiatan kepedulian dengan keberlanjutan (**Bisnis.com** Jakarta: 25 September 2014) .

Dalam penelitian ini luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* diukur dengan tingkat pengungkapan CSR pada Laporan Tahunan perusahaan yang dinyatakan dalam *Corporate Social Responsibility Index (CSRI)* yang akan dinilai dengan membandingkan jumlah pengungkapan yang disyaratkan dalam GRI meliputi 79 item pengungkapan yang terdiri dari 6 indikator yaitu: ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Apabila item informasi yang ditentukan diungkapkan dalam laporan tahunan maka diberi skor 1, dan jika item informasi tidak diungkapkan dalam laporan tahunan maka diberi skor 0. Semakin banyak item yang diungkapkan perusahaan maka semakin baik.

Berikut adalah gambaran beberapa perusahaan yang menjadi sampel penelitian yang dilengkapi dengan data variabel yang menjadi faktor-faktor pengungkapan CSR oleh perusahaan BUMN.

**Tabel 1.1 : Perusahaan BUMN, Kepemilikan Saham Pemerintah, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Profitabilitas dan Pengungkapan CSR tahun 2010-2014**

No	Kode Saham	Pengungkapan CSR (GRI Versi 3.0) item					Ukuran Perusahaan (Ln= Total Assets) %				
		2010	2010	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
1	ANTM	79	23,23	23,44	23,70	23,81	23,82	79	79	48	46
2	BBNI	41	23,24	26,42	26,53	26,68	26,76	43	50	24	24
3	JSMR	23	23,67	23,76	23,93	24,06	24,18	25	79	25	23
4	PGAS	65	22,55	22,19	22,09	21,95	21,99	65	77	43	44
5	TINS	79	15,90	15,70	15,63	15,88	16,10	79	79	79	33
6	TLKM	79	25,33	25,36	25,44	25,57	25,67	59	78	27	26
No	Kode Saham	Kepemilikan Saham Pemerintah (Government Shareholder) %					Leverage (DER) %				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	ANTM	65	65	65	65	65	0,27	0,41	0,54	0,71	0,85
2	BBNI	60	60	60	60	60	6,50	6,90	6,66	6,91	5,59
3	JSMR	70	70	70	70	70	1,27	1,32	1,53	1,66	1,79
4	PGAS	56,96	44,99	56,9	56,9	56,96	1,12	0,80	0,66	0,62	1,10
5	TINS	65	65	65	65	65	0,40	0,80	0,34	0,57	0,74
6	TLKM	52,47	53,24	53,9	53,14	52,6	0,78	0,69	0,86	0,83	0,81
No	Kode Saham	Profitabilitas (ROA) %									
		2010	2011	2012	2013	2014					
1	ANTM	0,14	0,13	0,15	0,02	0,04					
2	BBNI	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03					
3	JSMR	0,06	0,06	0,06	0,03	0,04					
4	PGAS	0,19	0,19	0,23	0,19	0,01					
5	TINS	0,16	0,14	0,07	0,07	0,07					
6	TLKM	0,16	0,15	0,17	0,16	0,15					

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), 2016

Keterangan :

ANTM : PT. Aneka Tambang Tbk

BBNI : PT. Bank Negara Indonesia Tbk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JSMR	: PT. Jasa Marga Tbk
PGAS	: PT. Perusahaan Gas Negara Tbk
TINS	: PT. Timah Tbk
TLKM	: PT. Telkom Indonesia Tbk

Berdasarkan data di Bursa Efek Indonesia diatas pada beberapa perusahaan BUMN yang menjadi sampel penelitian, menunjukkan bahwa besar atau tingginya Kepemilikan saham saham pemerintah, *Leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas tidak diikuti dengan luasnya pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti pada tabel di atas kepemilikan saham pemerintah tertinggi selama lima tahun terakhir ada pada PT Jasa Marga (JSMR) sedangkan pengungkapan CSR terbanyak ada pada PT Timah (TINS). Seharusnya semakin besar kepemilikan saham oleh pemerintah maka semakin luas pengungkapan CSRnya.

Di Indonesia suatu perusahaan dapat disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah sehingga *stakeholder* utama perusahaan ini adalah pemerintah. Dalam menjalankan operasional perusahaannya, BUMN berpedoman kepada perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu BUMN akan mendapatkan sorotan yang lebih oleh masyarakat, hal ini karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap BUMN dari pada perusahaan swasta. Bagi masyarakat, pengelolaan BUMN yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka tekanan pemerintah dan publik memiliki pengaruh terhadap pengelolaan perusahaan termasuk dalam pelaksanaan CSR.



Untuk *leverage* selama lima tahun terakhir, DER tertinggi ada pada PT Bank Negara Indonesia (BBNI) sedangkan pengungkapan CSR yang terbanyak ada pada PT. Timah (TINS). Hal ini sangat berbeda dengan penjelasan atau teori yang ada. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi. Tambahan informasi diperlukan untuk meyakinkan serta menghilangkan keraguan kreditur atas dipenuhinya hak hak mereka. Sehingga dengan *leverage* yang tinggi akan mengungkapkan lebih luas mengenai CSR.

Untuk Profitabilitas selama lima tahun terakhir, ROA tertinggi ada pada PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) sedangkan pengungkapan CSR terbanyak ada pada PT Timah (TINS). Hal berbeda dengan penjelasan atau teori yang ada, seharusnya dengan tingginya profitabilitas maka perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan tanggung jawab sosialnya. Hubungan antara kinerja keuangan suatu perusahaan, dalam hal ini profitabilitas, dengan pengungkapan tanggung jawab sosial paling baik diekspresikan dengan pandangan bahwa tanggapan sosial yang diminta dari manajemen sama dengan kemampuan yang diminta untuk membuat suatu perusahaan memperoleh laba. Sehingga dengan meningkatnya profitabilitas tentunya perusahaan akan lebih leluasa dalam pengungkapan CSR.

Untuk Ukuran Perusahaan selama lima tahun terakhir, Total Asset tertinggi ada pada PT. Bank Negara Indonesia (BBNI) sedangkan pengungkapan CSR yang terbanyak juga ada pada PT. Bank Negara Indonesia (BBNI). Hal ini sama dengan penjelasan atau teori yang ada. Perusahaan dengan total asset yang lebih tinggi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR masih menunjukkan hasil yang berbeda, bahkan bertentangan dengan antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang akan menjadi *research gap* dalam penelitian ini, sehingga sangat menarik dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan *research gap* tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM PEMERINTAH, LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)” (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang diteliti :

1. Apakah kepemilikan saham pemerintah (*government ownership*) berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah kepemilikan saham pemerintah, *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan saham pemerintah (*government ownership*) berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui apakah kepemilikan saham pemerintah, *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas

pengungkapan CSR pada perusahaan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat :

##### 1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan, *stakeholder* (Pihak yang berkepentingan), dan calon investor terutama sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehubungan dengan penerapan *CSR* dalam operasional perusahaan dan pengungkapannya dalam laporan tahunan perusahaan.

##### 2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya pada masa yang akan datang khususnya yang membahas topik yang sama.

##### 3. Bagi Peneliti

Sebagai aplikasi dan tambahan ilmu pengetahuan dari teori yang telah dipelajari didalam perkuliahan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

### BAB II TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang terdiri dari teori tanggung jawab sosial perusahaan, *corporate social responsibility*, pengungkapan csr, kepemilikan saham pemerintah, ukuran perusahaan, dan profitabilitas.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Disini dikemukakan secara singkat kerangka pemikiran, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta metode analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumen terhadap hasil penelitian. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi. Setelah semua uji terpenuhi, baru dilakukan uji hipotesis.

### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Di dalam bab ini disampaikan beberapa kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran yang relevan untuk penelitian yang selanjutnya dengan temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan